

Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Al Mubarak Kota Pekanbaru

Efendi

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
22290610062@students.uin-suska.ac.id

Abstrak

Kompetensi profesional guru merupakan faktor penting dalam mencapai kesuksesan proses pembelajaran. Beberapa persoalan penyebab kompetensi guru memprihatinkan ialah kurangnya motivasi untuk pengembangan diri, kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai. Pengelolaan pembiayaan Pendidikan sangatlah penting, karena akan mempengaruhi proses pendidikan dan upaya meningkatkan kompetensi guru. Manajemen pembiayaan di MI Ibnu Al Mubarak Kota Pekanbaru meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dan kendala manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru MI Ibnu Al Mubarak. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa instrument penelitian yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Aktivitas analisis data dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi/menarik kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) MI Ibnu Al Mubarak sudah membuat dalam perencanaan kerja madrasah program peningkatan kompetensi professional guru, yaitu di dalam RKJM dan RKTm. 2) Tahapan penyusunan rencana kerja madrasah di mulai dengan pembentukan tim pengembangan madrasah (TPM). dilanjutkan dengan pembekalan. Menganalisis dan menetapkan kondisi madrasah saat ini (EDM), menetapkan kondisi madrasah yang diharapkan, menetapkan program kerja dan indikator kinerja, dan Menyusun rencana anggaran madrasah, terakhir disusun menjadi rencana kerja tahunan madrasah. 3) Pelaksanaan pembiayaan semuanya di bawah koordinasi pengurus yayasan, setiap kegiatan di mulai mengajukan proposal kepada yayasan oleh kepala madrasah bersama panitia. Proposal akan validasi oleh pengurus yayasan dan bagian keuangan untuk disesuaikan dengan standar biaya umum (SBU) madrasah dan sumber dana mana yang akan di gunakan. Setelah divalidasi, pengurus yayasan mengembalikan kepada kepala madrasah dan panitia. 4) Pengawasan penggunaan dana Pendidikan dilakukan dengan Membuktikan dan menentukan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana, mengevaluasi proses pengelolaan keuangan madrasah, serta mengikut sertakan partisipasi orangtua siswa dalam perencanaan dan pelaporan keuangan, 5) Kendala yang dihadapi dalam pembiayaan Pendidikan di MI Ibnu Al Mubarak ada beberapa diantaranya: kurangnya ketersediaan dana, sumber dana terbatas, belum memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan Perubahan populasi dan persentase anak.

Kata kunci: *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Kompetensi Profesional Guru*

Abstract

The professional competence of teachers is a key factor in achieving the success of the learning process. Several issues that contribute to the concerning competence of teachers include a lack of motivation for self-development, as well as insufficient training and professional development. Educational financing management is crucial as it influences the educational process and efforts to enhance teacher competence. The financing management at MI Ibnu Al Mubarak, Pekanbaru City, involves several aspects: planning, implementation, and supervision. The objective of this study is to examine the educational financing management in improving the professional competence of teachers and the challenges faced in managing educational financing at MI Ibnu Al Mubarak. This research is qualitative in

nature, using descriptive analysis methods. The data for this study were collected using several research instruments, including observation, interviews, and documentation study. Data analysis activities involved data collection, data reduction, data display, and verification/conclusion drawing. To ensure data validity, triangulation techniques were used, including source triangulation and method triangulation. The results of the study indicate that: 1) MI Ibnu Al Mubarak has established a teacher professional competence improvement program within the madrasah's work plan, reflected in the RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah) and RKTm (Rencana Kerja Tahunan Madrasah). 2) The process of developing the madrasah's work plan begins with the formation of a Madrasah Development Team (TPM), followed by briefing and analysis to determine the current condition of the madrasah (EDM), setting the desired condition, establishing work programs and performance indicators, and preparing the madrasah's budget plan, which is then developed into an annual work plan. 3) The implementation of financing is fully coordinated by the foundation management, where each activity starts by submitting a proposal to the foundation by the head of the madrasah and the committee. The proposal is validated by the foundation management and the financial department to align with the madrasah's general cost standards (SBU) and determine which funding sources will be used. After validation, the foundation management returns the proposal to the head of the madrasah and committee. 4) The supervision of educational funding is carried out by ensuring that the actions taken align with the plan, evaluating the madrasah's financial management process, and involving parental participation in the planning and financial reporting. 5) The challenges faced in educational financing at MI Ibnu Al Mubarak include: limited availability of funds, restricted funding sources, underutilization of resources, and changes in student population and percentages.

Keywords: *Educational Financing Management, Teacher Professional Competence*

Pendahuluan

Pembiayaan merupakan bagian penting dari pengelolaan lembaga Pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 telah mengatur tentang standar pembiayaan yang meliputi : standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Standar biaya-biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Bab I pasal 1 ayat (10) menjelaskan Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia, tidak hanya tanggung jawab pemerintah, juga di butuhkan peran serta masyarakat dan pihak swasta. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Alasan tersebut pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas.

Guru merupakan komponen paling penting yang perlu diperhatikan. Sebab seluruh aktifitas pembelajaran di dalam kelas sangat dipengaruhi oleh keprofesionalisan seorang guru. Guru sebagai seorang tenaga profesional melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai seorang tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan guru diharuskan memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Guru profesional adalah guru yang menguasai substansi pekerjaannya secara profesional, dengan indikator : Pertama, mampu menguasai substansi mata Pelajaran secara sistematis, khususnya materi Pelajaran yang secara khusus diajarkannya. Kedua, memahami dan dapat menerapkan psikologi perkembangan sehingga seorang guru dapat memiliki materi pelajaran berdasarkan tingkat kesukaran sesuai dengan masa perkembangan peserta didik yang diajarkan. Ketiga, memiliki kemampuan mengembangkan program-program pendidikan yang secara khusus disusun sesuai dengan Tingkat perkembangan peserta didik yang diajarkan.¹

Meningkatkan profesional guru ada beberapa indikator untuk mengukurnya, diantaranya: Pertama, evaluasi kinerja guru. Kedua, partisipasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional membentuk guru yang unggul. Ketiga, penerapan inovasi pendidikan. Keempat, responsif terhadap kebutuhan siswa partisipasi dalam proses penjaminan mutu sekolah.² Meningkatkan profesional guru dengan pembiayaan pendidikan cukup untuk menunjang melaksanakan indikator yang dimaksud. Maka penting suatu lembaga pendidikan melakukan manajemen pembiayaan pendidikan. dengan melakukan perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*). Maka perlu dikaji bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan.

¹ Fatkhul Ibnu Prayoga, Nisaul Masruroh, Nur Vina Safitri, Pentingnya Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sebelas Maret nisaulmasruroh, 2021, hlm 616

² Riandika Davis, "Indikator Peningkatan Mutu Guru yang Efektif" <https://kuanta.id>, November 18, 2023 hlm 2

Manajemen secara etimologi istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris “management”. Kata management berasal dari kata manage yang artinya mengurus, mengatur, mengelola.³ Manajemen merupakan kegiatan yang berproses secara individu maupun kelompok dalam kegiatan merencanakan, mengelola, mengorganisasikan dan memberikan pengarahan kepada potensi-potensi yang ada dalam kelompok untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.⁴ Berdasarkan beberapa definisi tersebut bahwa manajemen pembiayaan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengelola pembiayaan sekolah dimulai dari perencanaan anggaran, pengadaan sumber dana, pengalokasian dana, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien dalam lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas.

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan di MI Ibnu Al Mubarak bersumber pada bantuan pemerintah, berupa bantuan operasional sekolah (BOS), sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), hasil wira usaha dan suntikan dana khusus dari Yayasan untuk menutupi kekurangan anggaran. Laporan keuangan tahun 2024, dari kedua sumber dana tersebut digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan sebagai berikut; Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, pengadaan, kesiswaan, ATK, listrik, alat kebersihan barang habis pakai, pemeliharaan, kewirauasaan, rapat.⁵ Laporan pengeluaran biaya Pendidikan di MI Ibnu Al Mubarak tahun 2024 tersebut, tidak terlihat pengeluaran untuk pengembangan sumberdaya manusia, lebih spesifiknya dalam pengembangan kompetensi tenaga Pendidikan dan kependidikan. Wawancara dengan kepala madrasah, beberapa pelatihan dapat terlaksana, diantaranya : perencanaan pembelajaran kurikulum Merdeka, pengenalan digital dalam pembelajaran, peningkatan profesional guru, dan UMKM di sekolah/madrasah.⁶

³ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, LKiS, Bantul Yogyakarta, 2020, hlm 5

⁴ Mesiono, M. Fajri Syahroni Siregar, Imron Bima Saputra, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Al-Manar Kecamatan Medan Johor*, Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, hlm 450

⁵ Dokumen laporan keuangan MI Ibnu Al Mubarak tahun 2024.

⁶ wawancara dengan kepala madrasah ibu Dwi Annisa Hasbi, S. Pd. Pada hari Selasa, 14 Januari 2025

Peneliti merasa ada kesenjangan antara biaya peningkatan profesional guru yang tidak terlihat di laporan keuangan MI Ibnu Al Mubarak tahun 2024,⁷ sedangkan beberapa kegiatan pelatihan terhadap guru-guru tetap terlaksana. Dalam rencana kerja tahunan madrasah tahun 2024 (RKTm) MI Ibnu Al Mubarak juga ada program peningkatan mutu guru.⁸ Alasan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian manajemen pembiayaan pendidikan di MI Ibnu Al Mubarak dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru-gurunya. Penjelasan observasi dan wawancara tersebut, maka peneliti mengangkat judul penelitian ini, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Al Mubarak Kota Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui manajemen pembiayaan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di MI Al Mubarak. Kedua, untuk mengetahui apa saja kendala manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru MI Ibnu Al Mubarak.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, subyek merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi sumber informasi atau data penelitian, sedangkan obyek adalah fenomena, masalah, atau situasi yang menjadi fokus penelitian. Jadi yang menjadi subyek pada penelitian ini adalah kepala madrasah sebagai informan utama, ketua Yayasan, kepala tata usaha, bendahara, dan tiga orang guru sebagai informan pendukung. Sedangkan obyek penelitian ini adalah manajemen pembiayaan Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di MI Ibnu Al Mubarak. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Juni 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dengan menggunakan instrument penelitian wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif (menyatakan hal-hal khusus pada bagian awal, kemudian menjelaskan hal-hal umum di bagian akhir), dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (proses

⁷ Dokumen laporan keuangan MI Ibnu Al Mubarak tahun 2024

⁸ Dokumen Rencana Kerja Tahunan MI Ibnu Al Mubarak tahun 2024

penarikan kesimpulan umum (universal) dari hal-hal yang bersifat khusus).⁹ Teknik analisis data menggunakan model Miles & Huberman Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.¹⁰

Penelitian ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natur setting). Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹¹ Menurut Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.¹² Analisis kualitatif dilakukan sepanjang penelitian dari awal hingga akhir. Hal ini dilakukan karena, peneliti kualitatif mendapat data yang membutuhkan analisis sejak awal penelitian. Bahkan hasil analisis awal akan menentukan proses penelitian selanjutnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini, sumber data diperoleh melalui dua metode utama yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Masing-masing metode saling memberikan informasi yang kemudian dilakukan triangulasi sehingga proses verifikasi dan validasi data terjamin keabsahannya. Dalam melakukan wawancara juga dilakukan kepada beberapa sumber yang relevan berdasarkan indikator yang disusun sebelumnya (triangulasi sumber).

Manajemen pembiayaan Pendidikan dalam peningkatan kompetensi guru dan kendala dalam manajemen pembiayaan Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta Ban Dung, 2013, hlm. 9

¹⁰ Ibid, hlm 160

¹¹ Sindu siyoto, M. ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, literasi media publishing, sleman, 2015, hlm 27

¹² Ibid, hlm 99

guru di MI Ibnu Al Mubarak Kota Pekanbaru dilakukan melalui observasi, wawancara dan study dokumen. Sumber utama atau informan utama penelitian ini adalah kepala madrasah MI Ibnu Al Mubarak yakni ibu Dwi Annisa Hasbi, S.Pd.

Penelitian ini agar lebih valid dan kredibel, perlu dilakukan konfirmasi kepada informan pendukung, yang terdiri dari beberapa unsur yang ada di MI Ibnu Al Mubarak. Yaitu: Ketua Yayasan Ibu Rinwiningsih, S.S. (informan pendukung 1), Kepala Tata Usaha Putri Nur Irawati, SE (informan pendukung 2), bendahara Madrasah Fradini Lolika Tanjung, S. Pd (informan pendukung 3), wakil bidang kurikulum Siti Subaidah, S. Pd. (informan pendukung 4) , Juli Arisandi, S. Pd. (guru/informan pendukung 5), Syaikul hadi pramono (guru/informan pendukung 6), dan Zahra hidayati (guru/informan pendukung 7).

Penelitian ini fokus pembahasannya adalah terkait dengan manajemen pembiayaan Pendidikan, yaitu perencanaan pembiayaan Pendidikan, pelaksanaan pembiayaan Pendidikan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara tertutup, panduan wawancara yang digunakan adalah seperangkat daftar pertanyaan yang di jawab langsung oleh subyek penelitian. Peneliti tidak menyiapkan jawaban dalam instrumen tersebut, jawaban sepenuhnya tergantung kepada subyek. Pertanyaan yang sudah disiapkan mengacu pada kisi-kisi yang sesuai dengan penelitian ini. Sebelum melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada informan utama. Secara garis besar daftar pertanyaan apersepsi sebagai pembuka, perencanaan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, pengawasan serta pelaporan pembiayaan dan Upaya peningkatan mutu professional guru.

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan pembuka tentang lama bertugas di MI Ibnu Al Mubarak, lama menjadi kepala madrasah, pengalaman di bidang manajemen pembiayaan Pendidikan dan kepemilikan sertifikat manajemen pembiayaan Pendidikan atau bimbingan tentang manajemen pembiayaan Pendidikan. Dari pertanyaan tersebut di dapat informasi dari informan utama yaitu kepala madrasah ibu Dwi Annisa Hasbi, S, Pd. Pada tanggal 20 Maret 2025. Bahwa beliau bertugas di MI Ibnu Al mubarak selama 4 tahun, menjadi kepala madrasah berjalan selama 2 tahun.

Pengalaman di bidang manajemen pembiayaan Pendidikan, kepala madrasah mengatakan bahwa di MI Ibnu Al Mubarak ia dapatkan, terutama semenjak menjadi kepala madrasah. Pengalaman tersebut dikarenakan mendapatkan tanggungjawab menjadi kepala madrasah, mau tidak mau harus belajar bagaimana cara mengelola Lembaga Pendidikan. tentang kepemilikan sertifikat manajemen pembiayaan Pendidikan kepala madrasah mengatakan tidak ada memiliki.

Modal untuk mengelola madrasah terutama manajemen pembiayaannya adalah bimbingan langsung dari ketua Yayasan Ibnu Al Mubarak yaitu ibu Rinwiningsih, S.S. beliau sudah berpengalaman di bidang manajemen Pendidikan sebelum beliau mendirikan Yayasan Ibnu Al Mubarak ini. Kegiatan sehari-hari ibu Rinwiningsih, S.S. juga sebagai narasumber ilmu manajemen dan enterpreniur. Selain itu, pembekalan dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru tentang pengelolaan dana bantuan operasional siswa (BOS).

Peneliti juga mengajukan beberapa pertanyaan tentang sumber keuangan madrasah, menentukan besaran SPP setiap siswa, apakah ada beasiswa atau keringanan bagi siswa tidak mampu, berapa dana BOS diterima dalam 1 tahun, berapa SPP siswa setiap bulannya, berapa jumlah hasil usaha setiap bulannya, suntikan dana Yayasan setiap bulannya dan berapa perputaran keuangan dalam 1 tahun.

Sumber keuangan di MI Ibnu Al Mubarak bersumber dari bantuan operasional sekolah (BOS), sumbangan pembinaan Pendidikan (SPP), hasil kewirausahaan, dan suntikan dari pengurus Yayasan. Untuk menentukan SPP siswa, madrasah mendata penghasilan orang tua siswa, dengan merentang ekonomi orang tua, apakah kategori ekonomi lemah, sedang atau mapan. Tidak semua siswa dimintakan untuk bayar SPP, tergantung ekonominya. Siswa yang ekonomi keluarga baik maka di minta bayar SPPnya penuh, yang ekonominya sedang dibebankan setengahnya, sedangkan siswa yang orang tuanya kategori lemah akan dibebaskan. SPP siswa setiap bulannya persiswa sebesar Rp 150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), siswa yang ekonominya menengah mereka dibebankan biaya setengahnya saja sebesar Rp 75.000 (*tujuh puluh lima ribu rupiah*), sedangkan siswa yang tidak mampu tidak ada dibebankan biaya.

Dana BOS yang di terima MI Ibnu Al Mubarak tahun 2024 berjumlah 134 juta. Penghasilan enterpreniur tidak menentu, tergantung penjualan produk, hasil pertanian,

peternakan, dan pesanan pelanggan. Sedangkan suntikan dana dari pengurus Yayasan tergantung berapa kekurangan dana akan dibayarkan pada setiap bulannya.¹³ Totalnya biaya operasional MI Ibnu Al Mubarak pada tahun 2024 sebesar 520 juta lebih. Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh ketua Yayasan saat di konfirmasi.

“Kepala madrasah saat ini baru menjabat selama 2 tahun. Adapun sumber keuangan di MI Ibnu Al mubarak bersumber dari BOS, SPP siswa, hasil enterpreneur dan biaya pribadi yang dikeluarkan dari saku pengurus Yayasan, seandainya keuangan yang berasal dari BOS, kewirausahaan dan SPP siswa tidak mencukupi kebutuhan operasional Pendidikan. Mengenai SPP siswa, madrasah tidak semua siswa membayar penuh sebesar Rp 150.000, tergantung dengan keadaan orang tua siswa. Sebab ada yang bayar hanya separoh dan ada yang digratiskan”.¹⁴

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

- a. Ketersediaan dokumen rencana kerja madrasah. (rencana kerja jangka menengah (RPJM), rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja anggaran madrasah (RKAM)). MI Ibnu Al Mubarak telah memiliki rencana kerja jangka menengah (RPJM), rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja anggaran madrasah (RKAM. Keberadaan RPJM, RKT dan RKAM juga dibuktikan oleh dokumennya.
- b. Waktu penyusunan rencana kerja . Penyusunan RKJM, RKJM, dan RKAM di MI Ibnu Al Mubarak di susun pada awal tahun Pelajaran, kecuali RKAM dana BOS yang di susun awal tahun anggaran sesuai tuntunan regulasi.
- c. Pentingnya madrasah punya perencanaan. Pentingnya perencanaan, berfungsi sebagai pedoman kerja dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan madrasah, dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan madrasah.
- d. Dasar membuat daftar kegiatan di perencanaan. Dasar yang menjadi penyusunan rencana kerja madrasah adalah evaluasi diri madrasah (EDM), di dalam EDM sudah adalah daftar rekomendasi untuk kegiatan di masa akan datang.
- e. Unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan Perencanaan Pembiayaan. Unsur yang terlibat dalam perencanaan adalah semua yang terkait dengan MI Ibnu Al

¹³ Dwi Annisa Hasbi, S, Pd/Kepala Madrasah, wawancara 20 maret 2025.

¹⁴ Rinwiningsih, S.S./Ketua Yayasan, wawancara, 20 Maret 2025.

Mubarak. Mulai dari pimpinan tertinggi yaitu ketua Yayasan, kepala madrasah, tata usaha, guru-guru dan juga mengikutsertakan perwakilan orang tua siswa yang diwakili oleh pengurus komite.

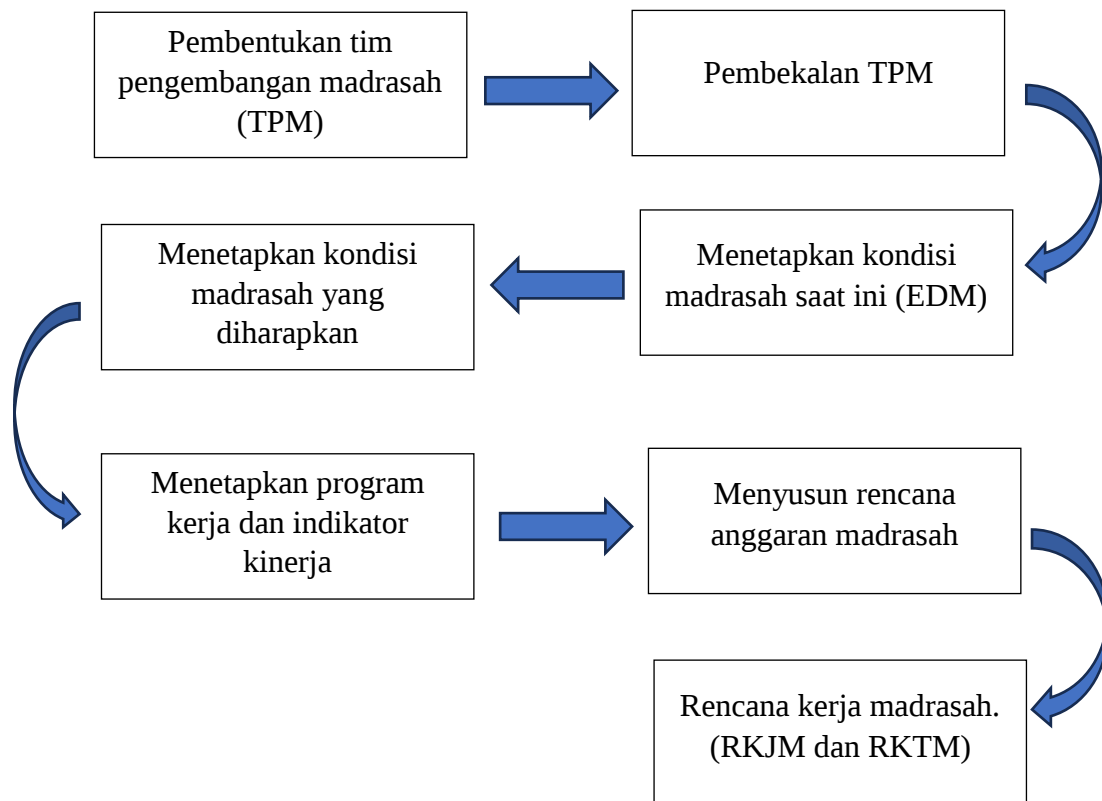
- f. Cara melibatkan guru dan pegawai terlibat dalam Menyusun perencanaan. Cara melibatkan guru dan pegawai terlibat dalam menyusun perencanaan adalah dengan cara menerbitkan SK penunjukkan tim penjaminan mutu madrasah (TPM) salah satu tugasnya adalah ikut serta Menyusun perencanaan madrasah.
- g. Tujuan melibatkan semua warga madrasah dalam Menyusun perencanaan. Tujuan melibatkan semua guru adalah agar setiap yang direncanakan merupakan hasil perencanaan Bersama, jadi semuanya merasa bertanggung jawab atas menyelesaikan perencanaan yang di rancang tersebut, terutama guru dan tata usaha. Pernyataan tersebut peneliti konfirmasi pada informan pendukung. Berikut cuplikannya:

“Semua kami di sini, pengurus yayasan, guru, tata usaha dan perwakilan komite terlibat dalam menyusun rencana kerja madrasah. Setiap kami di beri tanggungjawab membuat perencanaan sesuai dengan pembagian tugas berdasarkan SK tim”.¹⁵

- h. Tahapan atau alur perencanaan pembiayaan. Alur atau tahapan penyusunan rencana kerja madrasah di mulai dengan pembentukan tim pengembangan madrasah (TPM), selanjutnya dilakukan pembekalan untuk menyamakan persepsi. Pembekalan ini langsung dari pimpinan Yayasan dan juga dihadiri oleh pengawas madrasah. dilanjutkan Menetapkan kondisi madrasah saat ini bberpedoman pada evaluasi diri madrasah(EDM), selanjutnya menetapkan kondisi madrasah yang diharapkan, setelahnya menetapkan program kerja dan indikator kinerja, selanjutnya Menyusun rencana anggaran madrasah, terakhir disusun menjadi rencana kerja tahunan madrasah”.

¹⁵ Juli Arisandi, S. Pd./guru, wawancara, 20 Maret 2025

Berikut gambar alur penyusunan rencana kerja di MI Ibnu Al Mubarak.



Gambar 4. 5 Alur penyusunan rencana kerja madrasah

- i. Jenis kegiatan dalam perencanaan pendidikan. Perencanaan kegiatan Pendidikan tersebar di bidang kurikulum dan pembelajaran, bidang Tenaga Pendidikan & Kependidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang penganggaran & administrasi sesuai dengan kebutuhan yang terdaftar dalam evaluasi diri madrasah (EDM).
- j. Tantangan yang dihadapi dalam penganggaran pembiayaan operasional madrasah. Tantangan yang dihadapi dalam perencanaan diantaranya banyaknya kebutuhan madrasah, disebabkan madrasah ini baru mulai berkembang tentu banyak yang perlu dilengkapi, seperti sarana prasarana, kompetensi guru dan lain sebagainya.
- k. Cara mengatasi tantangan penganggaran sekolah tersebut dengan memasukkan semua kebutuhan madrasah ke dalam perencanaan jangka menengah, selanjutnya baru dipilah-pilah pada rencana kerja tahunan.

2. Pelaksanaan Pembiayaan pendidikan

Kegiatan pelaksanaan pembiayaan Pendidikan, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut ;

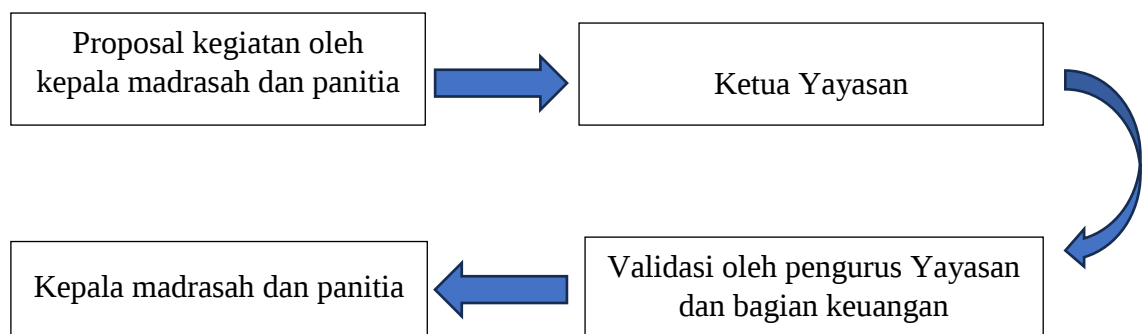
- a. Yang terlibat dalam mengelola keuangan madrasah. Yang terlibat dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) maupun sumbangan pembinaan Pendidikan (SPP) adalah kepala madrasah, tata usaha dan bendahara. Seluruh penggunaan biaya Pendidikan di MI Ibnu Al Mubarak atas pengetahuan dan izin dari Yayasan serta pengetahuan dari komite madrasah.
- b. Cara menarik SPP siswa (tunai atau transfer). Penarikan uang SPP dari orang tua bisa dilakukan secara langsung (tunai) dan bisa juga melalui transfer ke rekening yang sudah disiapkan oleh madrasah.
- c. Peran komite pemanfaatan keuangan madrasah. Mengenai keterlibatan komite dalam penggunaan dana BOS, komite mengetahui penggunaan dana BOS, bahkan komite juga ikut terlibat dalam perencanaan anggaran.
- d. Tahapan/alur pelaksanaan/pengeluaran/belanja untuk keguatan (SOP). Khusus tahapan pelaksanaan anggaran dalam menggunakan dana BOS diawali dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan penggunaan dana BOS. Pelaksanaan program penggunaan dana BOS berpedoman pada petunjuk teknis (Juknis) yang diedarkan oleh Kementerian Agama. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS didasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah yang harus terdaftar sebagai sumber penerimaan dalam RKAM/RKTM.
“Pengelolaan dana BOS maupun SPP adalah kepala madrasah, tata usaha dan bendahara. Penarikan uang SPP dari orang tua, bisa tunai dan bisa melalui transfer ke rekening yang sudah disiapkan oleh madrasah. Mengenai keterlibatan komite dalam penggunaan dana BOS, komite mengetahui penggunaan dana BOS, bahkan komite juga ikut terlibat dalam perencanaan anggaran”.¹⁶

¹⁶ Fradini Lolika Tanjung, S. Pd/Bendahara, wawancara, 20 Maret 2025

Pelaksanaan pembiayaan semuanya di bawah koordinasi Pengurus yayasan, Misalnya dalam pembiayaan sebuah kegiatan sekolah, kepala madrasah bersama panitia kegiatan menyusun proposal terlebih dahulu, setelah proposal jadi maka akan diajukan ke pengurus Yayasan dalam hal ini ketua Yayasan. Setelah melalui proses validasi yang dilakukan oleh pengurus Yayasan dan bagian keuangan maka proposal yang didalamnya sudah mencantumkan anggaran masing-masing item yang sudah disesuaikan dengan standar biaya umum (SBU) madrasah dan sumber dana mana yang akan di gunakan, apakah dari dana BOS atau dana swadaya, maka selanjutnya pengurus Yayasan mengembalikan kepada kepala madrasah dan panitia yang terlibat sesuai dengan jobdesknya.

“Pembiayaan semua kegiatan bawah koordinasi Pengurus yayasan, kepala madrasah bersama panitia kegiatan menyusun proposal terlebih dahulu, proposal diajukan ke ketua Yayasan. dilakukan validasi oleh pengurus Yayasan dan bagian keuangan. sumber dana mana yang akan di gunakan, apakah dari dana BOS atau dana swadaya, maka selanjutnya pengurus Yayasan mengembalikan kepada kepala madrasah dan panitia”.¹⁷

Berikut gambar alur koordinasi pelaksanaan pembiayaan madrasah di MI Ibnu Al Mubarak.



Gambar 4. 7 alur koordinasi pelaksanaan pembiayaan di MI Ibnu Al Mubarak.

- e. Hambatan yang dihadapi dalam pembiayaan Pendidikan. Ada beberapa diantaranya kurangnya ketersediaan dana, kenaikan biaya operasional Pendidikan, Perubahan populasi dan persentase anak, tidak maksimalnya pemanfaatan sumber daya, seperti bahan, waktu, dan manusia, sumber dana terbatas, dan sebagainya.

¹⁷ Fradini Lolika Tanjung, Ibid.

- f. Peran kepala madrasah dalam pengelolaan pembiayaan Pendidikan. Peran kepala madrasah dalam mengelola pembiayaan Pendidikan adalah perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM), mencairkan dana, membukukan dana, melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap penggunaan dana. mempertanggung jawabkan laporan keuangan kepada Yayasan, orang tua, dan pemerintah, membangun kepercayaan dan keyakinan terhadap praktik pengelolaan keuangan, dan membangun hubungan dan kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan.
- g. Jenis buku untuk pencatatan keuangan. Pembukuan keuangan di MI Ibnu Al mubarak ada dua, yaitu pembukuan khusus tentang dana BOS dan pembukuan yang berasal dari dana swadaya. Pembukuan dana BOS di Kelola oleh tim manajemen dana BOS Madrasah, sedangkan dana yang berasal dari swadaya di kelola oleh tim manajemen Yayasan. Masing-masing tim manajemen memiliki buku kas umum yang berfungsi untuk mencatat seluruh penerimaan dana dan seluruh pengeluaran dana dan buku kas pembantu untuk mencatat transaksi keuangan secara lebih rinci dan spesifik.
- h. Pertanggungjawaban keuangan. Pertanggungjawaban keuangan di MI Ibnu Al Mubarak juga dilakukan dua tim manajemen yang ada di MI Ibnu Al Mubarak, yaitu tim manajemen dana BOS dan tim manajemen dana swadaya. Tim dana bos membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian agama kota pekanbaru dan kepada pengurus Yayasan. Tim dana swadaya pertanggung jawaban kepada pengurus Yayasan MI Ibnu Al Muabrok.

Tentang pembukuan ini, peneliti mengkonfirmasi pada informan pendukung 2 yang beliau adalah bendahara Yayasan :

“Pembukuan keuangan di MI Ibnu Al Mubarak betul ada dua, yaitu pembukuan khusus tentang dana BOS dan pembukuan yang berasal dari dana swadaya. Pembukuan dana BOS di Kelola oleh tim manajemen dana BOS Madrasah, sedangkan dana yang berasal dari swadaya di Kelola oleh tim manajemen Yayasan. Termasuk pertanggungjawabannya, tim dana bos membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian agama kota

pekanbaru dan kepada pengurus Yayasan. Tim dana swadaya pertanggung jawaban kepada pengurus Yayasan”.¹⁸

3. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan

- a. Yang terlibat dalam pengawasan pembiayaan pendidikan yaitu pengawasan penggunaan dana BOS di MI Ibnu Al Mubarak dilakukan oleh komite, kepala Madrasah, tim BOS madrasah, tim BOS Kementerian Agama kota pekanbaru dan dari yayasan. Lalu dana yang bersumber dari swadaya seperti SPP, hasil wirausaha, dana rutin dari Yayasan pengawasan hanya dilakukan oleh kepala madrasah & pengurus Yayasan.
- b. Yang perlu di awasi dalam pembiayaan pendidikan adalah anggaran Pendidikan, apakah penggunaan efektif serta efisien atau tidak. Apakah anggaran dikelola dengan baik. Penggunaan anggaran apakah tepat sasaran atau tidak, dan lain sebagainya.
- c. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan saat pengawasan itu sendiri. Pengawasan perencanaan dilakukan di awal tahun anggaran. Pengawasan pelaksanaan selama satu berjalan kegiatan pembelajaran.
- d. Cara melakukan pengawasan terhadap penggunaan pembiayaan dilakukan dengan membuktikan dan menentukan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana, mengevaluasi proses pengelolaan keuangan madrasah, serta mengikut sertakan partisipasi orangtua siswa dalam perencanaan dan pelaporan keuangan.
- e. Cara memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan madrasah. Cara transparansi pengelolaan keuangan dengan memberikan laporan keuangan secara berkala. Sumber keuangan dari dana BOS laporan keuangannya dilakukan secara triwulan atau 3 bulan sekali. Laporan dana BOS dilaporkan ke Kementerian Agama Kota Pekanbaru sebab sumber dananya dari pemerintah. Sedangkan sumber dana swadaya pertanggungjawabnya dilakukan tiap bulan ditujukan kepada ketua Yayasan.

¹⁸ Fradini Lolika Tanjung, Ibid.

- f. Audit keuangan secara berkala. Dana BOS langsung di audit oleh tim pengelola dana BOS Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Jika ada laporan keuangan yang kurang sesuai, biasa tim audit dari Kementerian Agama kota Pekanbaru mengembalikan laporan untuk memperbaiki laporan. Sedangkan dana berasal dari swadaya, pihak Yayasan memeriksa kecocokan pengeluaran dengan kegiatan yang dilakukan.

4. Meningkatkan kompetensi profesional Guru

- a. RPJM/RKTM meningkatkan kompetensi profesional Guru. Program peningkatan mutu dalam rencana kerja seperti pelatihan model pembelajaran, pelatihan dengan isu kekinian. pertahun membahas kurikulum cinta dan kurikulum deep learning.

2	PENINGKATAN MUTU				
	➤ Guru				
	a. Diklat Kurikulum				
	b. Diklat peningkatan mutu guru MI Ibnu Al mubarak				
	c. Seminar / Workshop				
	d. Lomba Kreatifitas Guru				
	e. Lomba Guru Berprestasi				
	f. Lomba Kerja Guru				
	g. Kelompok Kerja Guru				
	h. Kelompok Kerja Kepala Madrasah				
	i. Pelatihan model pembelajaran				
	j. Study banding				
	k. Out Bound				

Gambar 4. 4 program peningkatan Mutu guru di MI Ibnu Al Mubarak

- b. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 dalam meningkatkan kompetensi professional guru. Program peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan biasa di buat dalam bentuk workshop atau pelatihan sehari saja. Seperti yang dilakukan tahun lalu pelatihan kompetensi berbasis digital, pelatihan Artificial Intelligence (AI) chat GPT dalam pembelajaran”. Pelatihan yang dilakukan tahun lalu, peneliti mengkonfirmasi pada salah seorang guru MI Ibnu Al Mubarak sebagai informan pendukung :

“Tahun 2024 kami mendapatkan beberapa pelatihan diantaranya : perencanaan pembelajaran kurikulum Merdeka, pengenalan digital dalam pembelajaran, peningkatan profesional guru, dan UMKM di sekolah/madrasah”.¹⁹

¹⁹ Siti Subaidah, S. Pd/guru/wakil kurikulum, wawancara, 20 Maret 2025

- c. Ketersediaan anggaran untuk meningkatkan kompetensi profesional guru tahun 2025 tidak dicantumkan secara jelas dalam perencanaan. Pengalaman tahun sebelumnya pelatihan untuk guru tetap terlaksana sesuai dengan kebutuhan. sebab sumber dana biasanya dari SPP atau langsung dari uang pribadi pengurus Yayasan”.
- d. Kegiatan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru untuk tahun 2025, yang sedang buming di gaungkan oleh pemerintah sekarang adalah penerapan kurikulum cinta oleh Kementerian agama dan kurikulum deep learning oleh dinas pendidikan. insya allah menjelang memasuki tahun Pelajaran baru akan kita coba lakukan pelatihan untuk guru-guru.
- e. Perhatian Yayasan dalam meningkatkan kompetensi professional. Pengurus yayasan sangat perhatian dalam meningkatkan kompetensi guru. Kegiatan pelatihan biasanya biayanya langsung di subsidi oleh Yayasan. Bahkan Yayasan langsung untuk menjalin komunikasi dengan mitra di bidang Pendidikan. selain itu Yayasan juga memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan jenjang Pendidikan.
- f. Kerjasama dengan instansi terkait (perguruan tinggi, LPMP dan lain-lain) dalam meningkatkan kompetensi professional. MI Ibnu Al Mubarak sudah melakukan Kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Pekanbaru. Yang sudah dilakukan dengan STAI Lukman Edi, Universitas Lancang Kuning, Politeknik caltek rumbai, Universitas Muhammadiyah Riau dan STAI Al Kifayah.
- g. Kendala manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi professional. Kendala utamanya adalah keterbatasan biaya, terutama dari BOS. Sebab dana BOS ini untuk kegiatan peningkatan mutu hanya sekali dibolehkan secara internal selama 1 tahun anggaran. Selain itu harus berkolaborasi dengan madrasah lain sehingga sulit membuat perencanaan pembiayaan program peningkatan mutu guru. Solusi yang dilakukan adalah mengajukan proposal ke yayasan untuk kegiatan peningkatan guru. Selain itu bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti yang sudah dilakukan dengan STAI Lukman Edi, Universitas Lancang Kuning, Politeknik caltek rumbai, dan Universitas Muhammadiyah Riau”.

Pembahasan

Ada tiga tahapan dalam manajemen pembiayaan yaitu: Perencanaan pembiayaan Pendidikan, pelaksanaan pembiayaan Pendidikan, & pengawasan pembiayaan Pendidikan.

1. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di MI Ibnu Al Mubarak

a. Perencanaan pembiayaan Pendidikan

Sumber keuangan di MI Ibnu Al Mubarak, bersumber dari bantuan operasional sekolah (BOS), sumbangan pembinaan Pendidikan (SPP), hasil kewirausahaan, dan suntikan dari pengurus Yayasan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tentu saja dengan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara pendidikan, masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, serta sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.²⁰

MI Ibnu Al Mubarak telah memiliki rencana kerja jangka menengah (RKJM), rencana kerja tahunan (RKTm), dan rencana kerja anggaran madrasah (RKAM). RKJM, RKTm, dan RKAM di susun pada awal tahun Pelajaran, kecuali RKAM dana BOS yang di susun awal tahun anggaran sesuai tuntunan regulasi. Permendikbudristek RI Nomor 47 Tahun 2023 Pasal 5 ayat (1) menjelaskan perencanaan kegiatan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja Satuan Pendidikan. ayat (2) menjelaskan rencana kerja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat :

- 1) rencana kerja jangka pendek dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
- 2) rencana kerja jangka menengah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.

²⁰ Anisa Apriyani, Nur Safidah, Sariyana Awilisni, Nurul Hidayati Murtafiah, Sumber Dana Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan, Vol. 01 No. 03 (2022) : 277-287.

Yang menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja madrasah adalah evaluasi diri madrasah (EDM), di dalam EDM sudah adalah daftar rekomendasi untuk kegiatan-kegiatan madrasah di masa akan datang. Permendikbudristek RI Nomor 47 Tahun 2023 Bab II tentang perencanaan kegiatan Pendidikan, Pasal 4 ayat (1) menjelaskan perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Peserta Didik secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan.

Semua orang yang terkait dengan MI Ibnu Al Mubarak terlibat dalam perencanaan. Mulai dari pimpinan tertinggi yaitu ketua Yayasan, kepala madrasah, tata usaha, guru-guru dan juga mengikut sertakan perwakilan orang tua siswa yang diwakili oleh pengurus komite. Ayat (4) menjelaskan perencanaan kegiatan Pendidikan disusun oleh Satuan Pendidikan bersama dengan komite sekolah/madrasah.

Cara melibatkan semua guru dan tata usaha serta unsur dari orang tua, dibuatkan SK penunjukkan tim penjaminan mutu madrasah (TPM). Tujuan melibatkan semua guru adalah agar setiap yang direncanakan merupakan hasil perencanaan Bersama, jadi semuanya merasa bertanggung jawab atas menyelesaikan perencanaan yang di rancang tersebut. Yang paling utama guru dan tata usaha mengetahui perencanaan madrasah.

Alur penyusunan rencana kerja madrasah di MI Ibnu Al Mubarak adalah dengan pembentukan tim pengembangan madrasah (TPM). Selanjutnya dilakukan pembekalan untuk menyamakan persepsi. Pembekalan ini langsung dari pimpinan Yayasan dan juga dihadiri oleh pengawas madrasah. Menganalisis dan menetapkan kondisi madrasah saat ini (EDM), menetapkan kondisi madrasah yang diharapkan, menetapkan program kerja dan indikator kinerja, dan Menyusun rencana anggaran madrasah, terakhir disusun menjadi rencana kerja tahunan madrasah.

Penyusunan RKS diawali dengan pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Pelaksanaan EDS menggunakan instrumen yang diturunkan dari regulasi tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dari EDS dihasilkan peta mutu sekolah yang menggambarkan kondisi sekolah yang merupakan capaian SNP

sekolah. Dari hasil EDS kemungkinan diperoleh berbagai kekurangan atau masalah pada masing-masing standar. Dari kekurangan atau masalah akan dibuat rekomendasi untuk perbaikan. Mengingat keterbatasan sumberdaya, kumpulan rekomendasi yang jumlahnya cukup banyak kemudian dipilih dengan menggunakan skala prioritas. hasil EDS adalah temuan atau masalah sebagai muara dari seluruh aktivitas sekolah, program kerja dan kegiatan yang disusun dan dimuat dalam RKS adalah hal-hal penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap peningkatan mutu sekolah.²¹

Tantangan yang dihadapi dalam perencanaan diantaranya banyaknya kebutuhan madrasah, disebabkan madrasah ini baru mulai berkembang tentu banyak yang perlu dilengkapi, seperti sarana prasarana, kompetensi guru dan lain sebagainya. Solusinya semua kebutuhan itu, dimasukkan saja dalam perencanaan jangka menengah, selanjutnya baru dipilah-pilah pada rencana kerja tahunan.

b. Pelaksanaan pembiayaan Pendidikan

Yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS maupun SPP adalah kepala madrasah, tata usaha dan bendahara serta komite. Komite mengetahui penggunaan dana BOS, bahkan komite juga ikut terlibat dalam perencanaan anggaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan tim pengelola dana BOS madrasah yang menyatakan tim BOS madrasah berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut: Bendahara pengeluaran; Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh kepala RA/Madrasah untuk bertanggung jawab dalam mengelola dana; Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator mengelola data; dan 1 (satu) orang dari unsur komite madrasah dan 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali siswa selain anggota/pengurus komite madrasah.²² Penarikan uang SPP dari orang tua bisa dilakukan secara langsung (tunai) dan bisa juga melalui transfer ke rekening yang sudah disiapkan oleh madrasah. Tidak semua siswa dimintakan untuk bayar SPP, tergantung ekonominya. Siswa yang

²¹ Eva Seske Gresye Moroki, S. Pd., M. Pd., Dr. Dian Ekawati, M. Pd. Manajerial Sekolah, Direktorat Pendidikan Profesi Dan Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Revublik Indonesia 2021, hlm. 5

²² Kepdirjenpendis No. 1291 Tahun 2024, Tentang Petunjuk Tenis Pengelolaan Dana BOS Raudatul Atfal Dan Madrasah.

ekonomi keluarga baik maka di minta bayar SPPnya penuh, yang ekonominya sedang dibebankan setengahnya, sedangkan siswa yang orang tuanya kategori lemah akan dibebaskan. SPP siswa setiap bulannya persiswa sebesar Rp 150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), siswa yang ekonominya menengah mereka dibebankan biaya setengahnya saja sebesar Rp 75.000 (*tujuh puluh lima ribu rupiah*), sedangkan siswa yang tidak mampu tidak ada dibebankan biaya.

Biaya pendidikan bukan hanya yang berbentuk uang, tetapi juga berbentuk biaya kesempatan yang menjadi potensi pendapatan bagi siswa untuk menyelesaikan studinya. Sehingga dalam proses studi ini, terdapat kategori konsep pembiayaan yang mendasar yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per siswa (unit cost).²³ Pelaksanaan pembiayaan semuanya di bawah koordinasi Pengurus yayasan, Misalnya dalam pembiayaan sebuah kegiatan sekolah, kepala madrasah bersama panitia kegiatan menyusun proposal terlebih dahulu, setelah proposal jadi maka akan diajukan ke pengurus Yayasan dalam hal ini ketua Yayasan. Setelah melalui proses validasi yang dilakukan oleh pengurus Yayasan dan bagian keuangan maka proposal yang didalamnya sudah mencantumkan anggaran masing-masing item yang sudah disesuaikan dengan standar biaya umum (SBU) madrasah dan sumber dana mana yang akan di gunakan, apakah dari dana BOS atau dana swadaya, maka selanjutnya pengurus Yayasan mengembalikan kepada kepala madrasah dan panitia yang terlibat sesuai dengan jobdesknya.

Hambatan yang dihadapi dalam pembiayaan Pendidikan ada beberapa diantaranya kurangnya ketersediaan dana, kenaikan biaya operasional Pendidikan, Perubahan populasi dan persentase anak, tidak maksimalnya pemanfaatan sumber daya, seperti bahan, waktu, dan manusia, sumber dana terbatas, dan sebagainya.

Pembukuan keuangan di MI Ibnu Al mubarak ada dua, yaitu pembukuan khusus tentang dana BOS dan pembukuan yang berasal dari dana swadaya. Pembukuan dana BOS di Kelola oleh tim manajemen dana BOS Madrasah, sedangkan dana yang berasal dari swadaya di Kelola oleh tim manajemen Yayasan. Masing-masing tim manajemen memiliki buku kas umum yang

²³ Eva Seske Gresye Moroki, dkk, Loc.cit. hlm. 3

berfungsi untuk mencatat seluruh penerimaan dana dan seluruh pengeluaran dana dan buku kas pembantu yang berfungsi untuk mencatat transaksi keuangan secara lebih rinci dan spesifik

c. Pengawasan pembiayaan Pendidikan

Pengawasan penggunaan anggaran terbagi menjadi dua, pertama Pengawasan penggunaan dana BOS di MI Ibnu Al Mubarak dilakukan secara bersama-sama oleh komite, kepala Madrasah, tim BOS madrasah, tim BOS Kementerian Agama kota pekanbaru dan dari yayasan. Yang kedua dana yang bersumber dari swadaya seperti SPP, hasil wira usaha dan dana rutin dari Yayasan, pengawasan hanya dilakukan oleh kepala madrasah dan pengurus Yayasan. Permendikbudristek RI Nomor 47 Tahun 2023 Pasal 21 ayat (1) menjelaskan pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh: Kepala Satuan Pendidikan; Komite sekolah/madrasah; Pemerintah pusat; dan Pemerintah daerah.

Pelaksanaan pengawasan pembiayaan di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan saat pengawasan itu sendiri. Pengawasan perencanaan dilakukan di awal tahun anggaran. Pengawasan pelaksanaan selama satu berjalan kegiatan pembelajaran. Cara melakukan pengawasan penggunaan dana Pendidikan dilakukan dengan Membuktikan dan menentukan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana, mengevaluasi proses pengelolaan keuangan madrasah, serta mengikut sertakan partisipasi orangtua siswa dalam perencanaan dan pelaporan keuangan.

Pelaporan pengelolaan keuangan dengan memberikan laporan keuangan secara berkala. Sumber keuangan dari dana BOS laporan keuangannya dilakukan secara triwulan atau 3 bulan sekali. Laporan dana BOS dilaporkan ke Kementerian Agama Kota Pekanbaru sebab sumber dananya dari pemerintah. Sedangkan sumber dana dari swadaya pertanggungjawabnya dilakukan setiap bulan yang ditujukan kepada ketua Yayasan.

Audit berkala dilakukan saat dilakukan pelaporan. Dana BOS langsung di audit oleh tim pengelola dana BOS Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Seandainya ada laporan keuangan yang kurang sesuai, biasa tim audit dari

Kementerian Agama kota Pekanbaru mengembalikan laporan untuk memperbaiki laporan. Sedangkan dana berasal dari swadaya, pihak Yayasan memeriksa kecocokan pengeluaran dengan kegiatan yang dilakukan.

Permendikbudristek RI Nomor 47 Tahun 2023 Pasal 20 ayat (1) menjelaskan pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi. Ayat (2) dilakukan terhadap program kerja yang telah dirancang untuk memastikan kegiatan pendidikan terlaksana sesuai dengan tujuan.

2. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Dan Kendala Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kompetensi Professional Guru MI Ibnu Al Mubarak

a. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di MI Ibnu Al Mubarak.

Perencanaan peningkatan kompetensi professional guru sudah ada dalam rencana kerja madrasah, yaitu di dalam RKJM dan RKTm. Biasanya di buat dalam bentuk workshop atau pelatihan sehari saja, secara umum dilakukan pada hari sabtu. Seperti yang dilakukan tahun lalu pelatihan kompetensi berbasis digital, pelatihan Artificial Intelligence (AI) chat GPT dalam pembelajaran. Adapun nominal yang dianggarkan tidak dituliskan dalam perencanaan, sebab sumber dana biasanya dari SPP atau langsung dari uang pribadi pengurus Yayasan. Perencanaan peningkatan mutu guru hanya di buat dalam bentuk program kerja madrasah saja. Menurut teori, perencanaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di lembaga pendidikan.²⁴ perencanaan harus menghimpun seluruh sumber daya yang mengarah untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran rencana kegiatan ke dalam bentuk dana untuk semua komponen kegiatan. Berdasarkan teori tersebut, perencanaan biaya kegiatan peningkatan kompetensi guru harusnya

²⁴ Nur Rahmi Sonia, *op.cit*, hlm 126

dicantumkan atau dipaparkan dengan gamlang, yang hanya perencanaan kegiatan saja.

b. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan dalam peningkatan kompetensi profesional guru di MI Ibnu Al Mubarak.

Pelaksanaan pembiayaan semuanya di bawah koordinasi Pengurus yayasan, Misalnya dalam pembiayaan sebuah kegiatan sekolah, kepala madrasah bersama panitia kegiatan menyusun proposal terlebih dahulu, setelah proposal jadi maka akan diajukan ke pengurus Yayasan dalam hal ini ketua Yayasan. Setelah melalui proses validasi yang dilakukan oleh pengurus Yayasan dan bagian keuangan maka proposal yang didalamnya sudah mencantumkan anggaran masing-masing item yang sudah disesuaikan dengan standar biaya umum (SBU) madrasah dan sumber dana mana yang akan di gunakan, apakah dari dana BOS atau dana swadaya, maka selanjutnya pengurus Yayasan mengembalikan kepada kepala madrasah dan panitia yang terlibat sesuai dengan jobdesknya.

Dana BOS untuk kegiatan peningkatan mutu hanya sekali dibolehkan secara internal selama 1 tahun anggaran. Selain itu harus berkolaborasi dengan madrasah lain sehingga sulit membuat perencanaan pembiayaan program peningkatan mutu guru. Kegiatan pelatihan kepala madrasah, guru, dan kegiatan pengembangan potensi siswa yang diselenggarakan oleh pihak satuan Pendidikan (Internal) dapat dibiayai dari dana BOP/BOS masing-masing paling banyak 1 (satu) kali kegiatan dalam satu tahun. Belanja non rutin non fisik dalam rangka kegiatan pelatihan kepala madrasah, guru dan tenaga kependidikan atau kegiatan pengembangan potensi siswa yang diselenggarakan pihak di luar satuan Pendidikan (pihak eksternal) antara lain biaya perjalanan dan akomodasi untuk mengikuti pelatihan dan/atau perlombaan yang diselenggarakan pihak di luar satuan Pendidikan.²⁵

Solusi yang dilakukan kepala madrasah MI Ibnu Al Mubarak adalah mengajukan proposal ke Yayasan untuk kegiatan peningkatan kompetensi profesional guru. Selain itu bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti yang sudah dilakukan dengan STAI Lukman Edi, Universitas Lancang Kuning,

²⁵ Kepdirjenpendis No. 1291 Tahun 2024, lo.cit. hlm 41.

Politeknik caltek rumbai, dan Universitas Muhammadiyah Riau. Tahun 2024 MI Ibnu Al Mubarak melaksanakan beberapa pelatihan diantaranya : perencanaan pembelajaran kurikulum Merdeka, pengenalan digital dalam pembelajaran, peningkatan professional guru pembelajaran berdiferensiasi, dan UMKM di sekolah/madrasah.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat beberapa sumber keuangan sekolah, madrasah ataupun pondok pesantren yang dilegalkan dan dapat dijadikan sumber pengelolaan satuan pendidikan, antara lain ialah yang didapatkan dari: Pemerintah pusat maupun daerah; Yayasan; Masyarakat; Orang tua atau wali dan iuran siswa; Penggalangan dana dari alumni; Sinergi dengan pengusaha ataupun memanfaatkan potensi usaha yang bisa digali dari dana yang ada (wirausaha); Donatur dan sumber-sumber lainnya.²⁶ Berdasarkan teori tersebut, dikarenakan keterbatasan biaya, MI Ibnu AL Mubarak mencoba berinovasi bersama atau menjalin mitra dengan lembaga Pendidikan lainnya dalam meningkatkan kompetensi professional guru. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara pendidikan, masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, serta sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di MI Ibnu Al Mubarak.

Pengawasan pembiayaan adalah penggunaan anggaran yang efektif dan efisien atau tidak. Anggaran di kelola dengan baik atau tidak. Penggunaan anggaran tepat sasaran atau tidak, dan lain sebagainya. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan saat pengawasan itu sendiri. Pengawasan perencanaan dilakukan di awal tahun anggaran. Pengawasan pelaksanaan selama satu berjalan kegiatan pembelajaran. Cara melakukan pengawasan penggunaan dana Pendidikan dilakukan dengan Membuktikan dan menentukan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana, mengevaluasi proses pengelolaan keuangan madrasah, serta mengikut sertakan partisipasi

²⁶ Eva Seske Gresye Moroki, dkk, Loc.cit. hlm. 4

orangtua siswa dalam perencanaan dan pelaporan keuangan. Hal ini senada yang di ungkapkan Fattah : bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang untuk mengukur, membandingkan, menilai sejauh mana alokasi biaya dan tingkat penggunaannya.²⁷

d. Implikasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di MI Ibnu Al Mubarak.

Implikasi atau akibat yang muncul dari implementasi manajemen pembiayaan Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi professional guru di MI Al Mubarak adalah :

- 1) Kualitas Pembelajaran meningkat, guru yang kompeten memiliki kemampuan mengajar yang lebih efektif, termasuk memilih metode pengajaran yang tepat, menggunakan media pembelajaran yang sesuai, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Penguasaan Materi yang kuat memungkinkan mereka untuk menyampaikan materi dengan jelas, akurat, dan menarik, sehingga siswa lebih mudah memahami dan menguasai materi. Pengembangan Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman.
- 2) Meningkatkan Motivasi Siswa dalam belajar tergambar dari Minat Belajar siswa mengikuti pembelajaran, Keterlibatan siswa untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran, dan peningkatan hasil belajar siswa.
- 3) Implikasi terhadap Lembaga Pendidikan MI Ibnu Al Mubarak tergambar dari :
 - a) Menjadi salah satu Lembaga Pendidikan pilihan orang tua mendaftarkan anaknya tempat belajar.
 - b) Terselenggara program Yayasan dalam bidang entrepreneur di MI Ibnu Al Mubarak, diantaranya: bank Sampah, ecoprint (teknik pencetakan pada kain menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, bunga, dan bagian tanaman lainnya untuk menghasilkan pola dan warna), dan ekobrik (bata ramah lingkungan yang terbuat dari botol plastik bekas yang diisi padat dengan sampah plastik).

²⁷ Nur Rahmi Sonia, *Loc.cit.*

- c) Program *entrepreneur* atau kewirausahaan, dengan memanfaatkan sumber daya lingkungan dapat menambah penghasilan madrasah, seperti mendirikan bank sampah, ternak ayam, ecoprint, dan pertanian.
- d) Menjadi tempat studi tiru oleh sekolah/madrasah baik yang ada di Pekanbaru dan luar Pekanbaru, bahkan ada dari Negara Malaysia.
- e. **Kendala manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru MI Ibnu Al Mubarak.**

Kendala yang dihadapi dalam pembiayaan Pendidikan di MI Ibnu Al Mubarak ada beberapa diantaranya:

- 1) Kurangnya ketersediaan dana. Kendala dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di MI Ibnu Al Mubarak adalah masih kurangnya ketersediaan dana. MI Ibnu Al mubarak merupakan madrasah yang baru mulai berkembang. Tahun Pelajaran 2024/2025 baru memasuki tahun ke 6. Tentu dibutuhkan banyak dana untuk membiayai operasional Pendidikan, seperti untuk gaji guru dan tenaga kependidikan, belanja barang dan jasa, pemeliharaan dan lain sebagainya.
- 2) Sumber dana terbatas. Untuk saat ini sumber dana untuk operasional Pendidikan berasal dari BOS, SPP siswa, kewirausahaan, dan suntikan dana dari Yayasan seandainya terdapat kekurangan untuk gaji guru. Dari sumber-sumber dana tersebut hampir 70%, dana digunakan untuk bayar honor guru. Sekitar 15% untuk biaya ATK, listrik, alat kebersihan barang habis pakai. Sisanya 15% lagi untuk pengadaan, pemeliharaan, modal kewirausahaan, dan kegiatan rapat-rapat rutin.
- 3) Belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya, seperti bahan, waktu, dan manusia. Belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya, seperti bahan, waktu, dan manusia. Sumber daya di MI Al Mubarak potensi cukup besar, terutama lahan. Areal tempat berdirinya MI Ibnu Al Mubarak seluas 4,5 hektar. Lahan yang sudah terbangun sekitar 1 hektar. Yang terdiri Gedung kantor, Gedung kelas, toilet, asrama guru, dan penjaga sekolah. Lahan sekitar 3,5 hektar ada berupa, lahan kosong, ada yang ditanami pohon durian, peternakan ayam, dan beberapa kolam. Namun dari lahan yang

sudah di manfaatkan hasil belum maksimal, bahkan tidak menghasilkan karena kekurangan tenaga untuk mengerjakannya, sehingga Yayasan masih mensubsidi gaji guru tiap bulan.

- 4) Perubahan populasi dan persentase anak. Perubahan populasi dapat membebani infrastruktur Pendidikan. MI Al Mubarak yang baru berjalan selama 6 tahun. Otomatis setiap tahun siswa akan bertambah, infrastruktur juga harus bertambah, seperti kelas, meja, kursi papan tulis dan kelengkapan kelas lainnya. Selain itu tenaga pendidik juga harus di tambah seiring bertambahnya jumlah kelas. Dengan pemakaian infrastruktur dan tenaga pendidik maka biaya operasional Pendidikan di MI Al Mubarak juga akan bertambah. Walau diikuti oleh kenaikan penerimaan BOS. Namun kadang tidak diikuti penambahan penghasilan sumber dana lainnya.

Kesimpulan

Manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di MI Ibnu Al Mubarak Kota Pekanbaru, di mulai dari perencanaan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan dan pengawasan pembiayaan. MI Ibnu Al Mubarak sudah membuat dalam perencanaan kerja madrasah program peningkatan kompetensi professional guru, yaitu di dalam RKJM dan RKTm. Alur penyusunan rencana kerja madrasah di mulai dengan pembentukan tim pengembangan madrasah (TPM). dilanjutkan dengan pembekalan untuk menyamakan persepsi. Pembekalan ini langsung dari pimpinan Yayasan dan juga dihadiri oleh pengawas madrasah. Menganalisis dan menetapkan kondisi madrasah saat ini (EDM), menetapkan kondisi madrasah yang diharapkan, menetapkan program kerja dan indikator kinerja, dan Menyusun rencana anggaran madrasah, terakhir disusun menjadi rencana kerja tahunan madrasah. Pelaksanaan pembiayaan semuanya di bawah koordinasi Pengurus yayasan, setiap kegiatan di mulai mengajukan proposal kepada Yayasan oleh kepala madrasah bersama panitia. Proposal akan validasi oleh pengurus Yayasan dan bagian keuangan untuk disesuaikan dengan standar biaya umum (SBU) madrasah dan sumber dana mana yang akan di gunakan, apakah dari dana BOS atau dana swadaya. Setelah divalidasi pengurus Yayasan mengembalikan kepada kepala madrasah dan panitia yang terlibat sesuai

dengan jobdesknya. Pengawasan penggunaan dana Pendidikan dilakukan dengan Membuktikan dan menentukan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana, mengevaluasi proses pengelolaan keuangan madrasah, serta mengikut sertakan partisipasi orangtua siswa dalam perencanaan dan pelaporan keuangan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pembiayaan Pendidikan di MI Ibnu Al Mubarak ada beberapa diantaranya: kurangnya ketersediaan dana, sumber dana terbatas, belum memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan Perubahan populasi dan persentase anak. Dari hasil penelitian ini perlu ditingkatkan lagi peran komite madrasah dalam hal pemberi pertimbangan, pendukung dan pengontrol, sehingga peran komite lebih optimal dalam upaya peningkatan kompetensi professional guru. Pemerintah juga harus dapat mengevaluasi dengan baik dari seluruh mekanisme manajemen pembiayaan penggunaan dana BOS diberikan kepada madrasah. Agar madrasah leluasa dapat menggunakan dana BOS untuk program peningkatan kompetensi professional guru.

Daftar Pustaka

- Apriyani, Anisa, Nur Safidah, Sariyana Awilisni, Nurul Hidayati Murtafiah, Sumber Dana Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan*, Vol. 01 No. 03 (2022) : 277-287.
- Davis, Riandika “Indikator Peningkatan Mutu Guru yang Efektif” <https://kuanta.id>, 2023.
- KEPDIRJENPENDIS No. 1291 Tahun 2024, Tentang Petunjuk Tennis Pengelolaan Dana BOS Raudatul Atfal Dan Madrasah
- Mesiono, M. Fajri Syahroni Siregar, Imron Bima Saputra, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Al-Manar Kecamatan Medan Johor, *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Moroki, Eva Seske Gresye, Dian Ekawati, Manajerial Sekolah, Direktorat Pendidikan Profesi Dan Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Revublik Indonesia 2021.
- Prayoga, Fatkhul Ibnu, Nisaul Masruroh, Nur Vina Safitri, Pentingnya Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sebelas Maret Nisaulmasruroh, 2021.
- Siyoto, Sindu., M. Ali Sodik, *Dasar Metologi Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sonia, Nur Rahmi, dkk, Manajemen Pendidikan (Tinjauan Teori dan Praktis), Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Yogyakarta: LKiS, 2020.